

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**
(Studi di Dinas Pasar Kota Malang)

JURNAL

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**

**Oleh :
JORDIAN ARI
NIM. 0810113301**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e)
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1
TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Implementasi
di Dinas Pasar Kota Malang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Jordian Ari**
- b. NIM : 0810113301**
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : 21 Januari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr.Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP.19600810 198601 1 002

IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (*Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang*)

Dibawah Bimbingan : 1. Agus Yulianto, S.H., M.H.

2. Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Abstrak

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang, serta hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang dan agar dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat dengan tujuan mencari dan mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampai saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri.

IMPLEMENTATION of article 3 paragraph (1) subparagraph (d) and (e) of the REGULATION REGION of MALANG number 1 in 2000 ABOUT the ARRANGEMENT and CONSTRUCTION of STREET VENDORS (studies in The Market town of Malang)

Dibawah Bimbingan : 1. Agus Yulianto, S.H., M.H.

2. Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Abstract

Growing number of informal sector street vendors in the city of Malang, raises an issue that dilematis, on one side of the sector is small community supporting the economy, but on the other hand its existence gives rise to many problems, especially with regard to public order offences. This research was conducted to find out the how setting and implementation coaching sellers conducted by Hapless City Government related services especially in the service of the Market town of Malang, as well as any barriers faced by Poor City Government related services i.e. in particular The Markets of Malang and in order to provide solutions in applying article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors in the city of Malang.

Research carried out using this type of empirical research that in solving that will be discussed, based on the regulations by linking the fact that occur in the field included in the community with the aim of seeking and knowing the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang Number 1 number 1 point d and e in 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

Methods research approach used in this study is the juridical sociological to review the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors. This approach is used to look at the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

Rule number 1 of Malang Area in 2000 was about setting and coaching Sellers still holds up today and the street vendors there are still many who do not abide by the rules in the regulation of the area. As well as lack of concern from traders to keep order, cleanliness, and convenience of the location where the trade was all about breaking the rules that have been set.

Arrangement and construction of street vendors of related Regulations of Malang Area number 1 of the year 2000 researchers can conclude that Regulation those areas still not optimally in their application in the field, due to a number of factors both internal and external barriers from the point of view of related agencies as well as from the traders themselves. Barriers in the implementation of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang.

Optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000, terhadap para pedagang kaki lima. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, serta rendahnya tingkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, yang sering berpindah-pindah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari pedagang kaki lima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pedagang kaki lima mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian kota dan membantu pemerintah dalam upaya memecahkan masalah pengangguran. Tetapi di sisi lain, kehadiran pedagang kaki lima sering dijadikan penyebab kesemrawutan lalu lintas, tidak bersihnya lingkungan, membuat kondisi kumuh dan tidak teratur serta menyebabkan sampah-sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat. Masalah tersebut berdampak kemacetan lalu lintas dan sudah seharusnya untuk lebih sering ditertibkan oleh instansi pengawas yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang yang berwenang.

Bagi PKL yang memilih zone public sebagai tempat mangkal, sudah barang tentu bukan alasan. Salah satu pertimbangan utama PKL memilih kawasan public sebagai tempat usaha adalah karena potensi pembeli yang luar biasa meski mereka juga sadar bahwa hal ini melanggar aturan. Dengan uang dan aset yang terbatas sudah barang tentu mustahil PKL mampu menyewa lahan-lahan atau ruang-ruang yang resmi seperti layaknya pemilik toko yang biasa berjualan di plaza atau di pasar semi modern. Setidaknya dengan adanya modal yang terbatas PKL masih bisa menyewa tempat yang biasa pada umumnya telah disediakan oleh pemerintah yaitu di pasar tradisional.

Salah satunya cara yang biasa dilakukan PKL untuk mendekati pembeli, sekaligus menggelar dagangannya, akhirnya adalah dengan berdagang di trotoar, di pinggir jalan, dan berbagai ruang kosong yang sebenarnya ruang public. Bagi kebanyakan PKL, tidak peduli apakah yang

mereka lakukan melanggar hukum atau tidak, tetapi yang penting mereka bisa berjalan dan menempati lahan usaha sesuai kepentingan mereka.

Seperti contoh PKL di Pasar Kebalen, dengan kondisi jalan raya yang seharusnya cukup lebar ruas sisinya namun dengan adanya lapak-lapak para PKL di sepanjang jalan maka membuat arus lalu lintas menjadi padat. Padahal untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melalui instansi yang berwenang yakni Dinas Pasar Kota Malang telah menyediakan tempat yang sudah diatur dalam perjanjian mana yang diijinkan dan mana yang tidak diijinkan untuk digunakan lahan berdagang.

Akan tetapi melihat para PKL pasar Kebalen yang semakin bertambah dan telah menggunakan lahan dagang diluar lokasi yang telah ditentukan Dinas Pasar, semua berdampak merugikan bagi pihak lain seperti pengendara kendaraan yang tidak bebas dalam perjalanan, banyaknya orang lalu lalang, kendaraan-kendaraan penyetok barang yang bercampur arus lalu lintas bagi angkutan jalan sampai kotoran-kotoran yang disebabkan pasar menimbulkan bau tidak sedap dan tidak enak dipandang. Belum lagi adanya preman pasar yang biasanya turut meminta bagian dari para PKL dengan dalil biaya keamanan, oleh sebab itu tidak sedikit PKL yang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan dengan alasan takut akan preman pasar yang bisa meminta bagiannya dua kali lipat serta alasan sepiunya pengunjung jika pindah ke tempat yang disediakan pemerintah kota dan lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan karena dapat meraup banyak para pembeli.

Dari contoh-contoh di atas, merupakan suatu hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur ketertiban para PKL untuk berdagang di lokasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hambatan-

hambatan yang dimaksud dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal antara instansi dengan PKL yang saling berhubungan.

Salah satu bentuk pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang dalam menangani masalah pedagang kaki lima (PKL) dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah Kota Malang. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang. Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL tersebut merupakan usaha pemberdayaan PKL agar dapat melakukan kegiatan mereka tanpa melanggar peraturan. Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya Pemkot untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai ketentuan.

Sesuai dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang isinya menyangkut larangan-larangan yang diperuntukkan pada pedagang kaki lima, antara lain ; (1) Melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; (2) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan; (3) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; (4) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; (5) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah; (6) berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan

dan seijin kepala daerah; (7) Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 bulan.¹

Dari poin-poin diatas, dalam realisasi di lokasi tidaklah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 karena hampir semua poin-poin tersebut dilanggar oleh para pedagang kaki lima yang berada dalam lingkup pasar Kebalen Kota Malang. Para PKL di pasar Kebalen Kota Malang ini terkenal karena keengganannya untuk taat pada peraturan yang ada. Paling sering terjadi adalah mereka menggunakan lahan diluar yang diijinkan dan berdagang yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di sekitarnya.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (*Studi di Dinas Pasar Kota Malang*)" dengan poin-poin tertentu yang peneliti ambil yakni poin (d) dan (e) yang isinya melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Serta menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang?

¹ Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dan bagaimana solusinya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang; dan
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang serta dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. karena hendak mencari dan mengetahui Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.²

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima³

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil di daerah Pasar Kebalen Kota Malang dan sekitarnya. Lokasi penelitian dipilih karena obyek penelitian yang berada di sana masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang membuat kawasan menjadi kumuh dimana pedagang kaki lima masih berjualan di sana. Serta lokasi tersebut belum pernah diteliti, maka dari itu peneliti memilih lokasi tersebut.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

³ *Ibid*

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui tehnik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Pasar Kota Malang dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan mendengarkan sendiri suaranya, terhadap pengawasan dan pembinaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang di peroleh dari studi serta litelatur yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang

Selama ini pihak Dinas Pasar telah melaksanakan amanat Undang-Undang (dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang) dengan baik, terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar yaitu melakukan razia atau keliling ke tempat di mana para PKL melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yakni pada pasal 12 ayat (2) huruf e yaitu :

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :

e. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);

Peraturan Daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pihak Dinas Pasar untuk melakukan pengawasan kepada para PKL yang dalam hal ini berupa penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL. Semua ini dilakukan secara rutin oleh pihak Dinas Pasar setiap 1 minggu sekali serta dilakukan tipiring (tindak pidana ringan) bagi PKL yang melanggar dilakukan setiap akhir bulan sekali.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 12 November 2013

Penataan yang dilakukan untuk saat ini memang dapat dikatakan hanya mencakup hal-hal sepele yakni penataan tempat yang diperbolehkan ditempati oleh para PKL. Hal ini harusnya tidak dianggap sepele, karena dengan status Kota Malang sebagai salah satu Kota Wisata, maka PKL haruslah ditata tempatnya sehingga tidak merusak pemandangan kota Malang.

Pembinaan yang dilakukan juga harus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidaklah mudah membina para PKL yang berada di Kota Malang. Pembinaan ini diartikan dengan memberikan pengertian kepada setiap PKL yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga keindahan kota tetap terjaga.

Pengawasan ditempatkan pada posisi terakhir dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pasar, namun pengawasan ini memiliki arti yang tidak kalah penting dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk terus menerus memantau para PKL agar mereka tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan.⁵

B. Hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

1). Hambatan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

1. Hambatan Internal.

Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputus

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 13 November 2013

asaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas Pasar. Hal tersebut terbukti dari pernyataan dari Bapak Tripim selaku Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, yakni bahwa razia diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekita Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).⁶

Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar. Hambatan lain adalah kurang adanya kesinergian antara instansi-instansi yang saling berkaitan dalam hal ini selain Dinas Pasar, juga ada Satpol PP untuk instansi yang melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan dan juga pihak Pengadilan dalam pemberian sanksi denda pada para pedagang yang tidak ada komunikasi dengan pihak Dinas Pasar.

2. Hambatan Eksternal.

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar.⁷ Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh para PKL dengan membayar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkant tersebut dengan cepat.⁸

2) Solusi dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

a) Solusi untuk menghadapi hambatan internal dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah melakukan pengawasan terhadap para PKL yang berada di Pasar Kebalen Kota Malang tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

1. Melakukan koordinasi terus menerus dengan pihak satpol pp untuk melakukan razia terus menerus.

Rutinitas razia yang dilakukan setiap seminggu 1x dirasa sangat amat kurang, ditambah lagi ketika razia yang dilakukan rutin pada satu hari tertentu, sehingga dapat dengan mudah dihafal oleh para PKL. Koordinasi dengan pihak Satpol PP ini dimaksudkan agar pihak Dinas Pasar mendapatkan bantuan yang sepadan dari pihak Satpol PP. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu pihak Dinas Pasar dalam melakukan razia sehingga razia yang dilakukan semakin rutin dan tidak terbatas pada hari-hari tertentu.

2. Memberikan pengarahan pada setiap anggota Dinas Pasar akan pentingnya menindak setiap PKL yang melanggar aturan.

Pengertian ini diberikan kembali kepada setiap anggota Dinas Pasar dimaksudkan agar setiap anggota Dinas Pasar mengerti bahwa adalah tugas mereka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut salah satunya terhambat dikarenakan anggota Dinas Pasar merasa enggan untuk menindak karena para PKL merasa denda yang hanya Rp. 50000,- adalah denda yang sangat murah bagi mereka. Pihak Dinas Pasar harus tetap memberikan sanksi kepada mereka (PKL) walaupun denda yang diberikan dapat dikatakan kecil, bahkan kalau perlu pihak Dinas Pasar akan mengajukan penambahan denda yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

b) Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang berada di dalam Dinas Pasar Kota Malang, namun pemberian pendidikan tersebut tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Memberikan pengertian kepada PKL akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah yang telah ada adalah sesuatu yang harus ditaati oleh setiap elemen yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, elemen tersebut tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum, namun juga masyarakat secara khusus yakni para PKL. Para PKL diharapkan menaati peraturan daerah yang telah ada, dikarenakan untuk menjaga keindahan Kota Malang sebagai kota wisata.
2. Pihak Dinas Pasar telah berusaha melakukan sosialisasi kepada para PKL yang ada untuk terus menaati peraturan dan bukan menaati peraturan dikarenakan adanya razia yang dilakukan. Hal ini lebih disebabkan karena keinginan dari pihak Dinas Pasar yang menginginkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 13 November 2013

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampai saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

A. Hambatan Internal :

1. Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputus asaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas Pasar.

Hal tersebut terbukti dari rutinnnya operasi razia yang diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar.

2. Selain hambatan di atas, ada juga faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 kurang maksimal karena dari instansi terkait pembinaan dan pengaturan pedagang kaki lima belum nampak adanya kerjasama antara Dinas Pasar Kota Malang dengan Satpol PP serta dari pihak pengadilan dalam sidang tipiring yang dilaksanakan setiap akhir bulan sekali untuk membina para pedagang yang melanggar.

B. Hambatan Eksternal :

1. Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar. Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar yang bekerja sama dengan Satpol PP untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh

para PKL dengan membayar biaya yang minimalnya “hanya” Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan kembali.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkan tersebut dengan cepat.

1. Solusi untuk mengatasi hambatan internal
 - a. Memanfaatkan jumlah tenaga kerja dalam instansi Dinas Pasar untuk lebih menggiatkan lagi operasi razia keliling pada pasar-pasar yang ada di Malang terutama yang bermasalah seperti pasar Kebalen. Dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan seperti Satpol PP untuk pengawasan PKL, Dishub untuk penataan lalu lintas, DPU untuk penataan lokasi dagang yang diperbolehkan
 - b. Antara pihak Dinas Pasar maupun pihak pengadilan dalam melaksanakan tipiring secara rutin terhadap PKL yang melanggar harus saling komunikasi untuk bisa lebih menekankan sanksi yang lebih berat daripada biasanya yang peneliti yakin dapat meminimalisir adanya PKL yang melanggar dikarenakan penetapan sanksi ringan untuk para PKL yakni dilakukan oleh hakim diluar pengadilan. Selain itu penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita

akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

2. Solusi untuk mengatasi hambatan eksternal
 - a. Menambah nominal sanksi denda yang dijatuhkan pada para pedagang kaki lima yang sering terjaring razia melakukan pelanggaran serta jika diperlukan ditambahkan sanksi kurungan dalam waktu tertentu agar menimbulkan efek jera serta para pedagang dapat terbiasa dengan tertib untuk mematuhi aturan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
 - b. Penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

B.Saran

Saran yang dapat peneliti ajukan untuk ke depannya adalah

- a. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat maksimal pelaksanaannya, maka haruslah dilakukan penegakan hukum dari Dinas Pasar selaku Dinas yang memberi ijin dagang kepada PKL.

- b. Memberikan solusi berupa prosedur-prosedur yang memudahkan PKL untuk mentaati aturan yang diberlakukan serta mengadakan pertemuan rutin antar pedagang kaki lima dengan pihak Dinas Pasar yang mana Bagian Pemeliharaan PKL yang berperan di Dinas tersebut dengan didampingi pihak Satpol PP untuk saling berkomunikasi agar bertujuan PKL lebih tertata dan berkurang PKL-PKL yang sering melanggar aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

Hasil wawancara dengan Narasumber Kepala Bidang Pemeliharaan PKL

Dinas Pasar Kota Malang

Hasil wawancara dengan Narasumber Kepala Bidang Pembinaan PKL

Dinas Pasar Kota Malang